

## STRATEGI DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PARKIR DI KABUPATEN BOJONEGORO

M Wafiq Mahbubi<sup>1</sup>, Esa Septian<sup>2</sup>, Sri Kasiami<sup>3</sup>

Universitas Bojonegoro

[mahbubisme589@gmail.com](mailto:mahbubisme589@gmail.com)<sup>1</sup>, [esaseptian28@gmail.com](mailto:esaseptian28@gmail.com)<sup>2</sup>,

[srikasiami@gmail.com](mailto:srikasiami@gmail.com)<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi Dinas Perhubungan dalam meningkatkan pelayanan parkir di Kabupaten Bojonegoro dan mengetahui tindakan apa saja yang selanjutnya diperlukan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan pelayanan parkir di Kabupaten Bojonegoro. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan, juru parkir, dan masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Dalam pengumpulan data, metode yang digunakan mencakup wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisisnya melibatkan langkah-langkah seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini, tidak tersedianya parkir parkir elektronik yang membuat masyarakat lebih memilih parkir liar agar terhindar dari pungutan liar atau menghindari pembayaran yang berlebih. Melalui analisis SWOT dengan melihat faktor internal tentang *strengths* (kekuatan) dan *weaknesses* (kelemahan), serta faktor eksternal yakni *opportunities* (ancaman) dan *thearts* (peluang) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro serta menggunakan Tes Litmus untuk diketahui seberapa strategisnya isu tersebut, maka ditemukan strategi yang sangat strategis yaitu dengan menyediakan parkir elektronik di beberapa titik parkir guna mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran serta meminimalisir adanya pungutan liar yang dapat mengakibatkan penurunan pendapatan daerah yang berasal dari parkir.

Kata kunci: **Strategi, Pelayanan Publik, Parkir**

### ABSTRACT

*This research aims to find out and analyze the strategy of the Transportation Agency in improving parking services in Bojonegoro Regency and find out what further actions are needed by the government to improve parking services in Bojonegoro Regency. This research method is a qualitative method with a descriptive approach. Determination of informants in this study using a purposive sampling method. The samples in this study are the Head of the Parking Management Section of the Transportation Agency, parking attendants, and the people of Bojonegoro Regency. In collecting data, the methods used include interviews, observation, and documentation, while the analysis involves steps such as data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study, the unavailability of electronic parking lots makes people prefer illegal parking to avoid illegal levies or excessive payments. Through SWOT analysis by looking at internal factors regarding strengths and weaknesses, as well as external factors, namely opportunities and threats at the Bojonegoro Regency Transportation Office, and using the Litmus Test to find out how strategic the issue is, a very strategic strategy was found, namely by providing electronic parking at several parking spots to make it easier for people to make payments and minimize illegal levies which can result in a decrease in local revenue from parking.*

M. Wafiq Mahbubi, Cs: Strategi Dinas Perhubungan ....

Page. 362

*Keywords: Strategy, Public Service, Parking*

---

## **PENDAHULUAN**

Seiring dengan kemajuan transportasi dari waktu ke waktu, parkir menjadi salah satu elemen atau komponen kebutuhan transportasi yang semakin penting. Pemanfaatan transportasi terlihat pada sejumlah aktivitas masyarakat, termasuk memberikan dampak positif terhadap perekonomian, masyarakat, politik, dan wilayah (Raharja & Murdomo, 2021). Akan tetapi, dengan perkembangan transportasi yang terus meningkat, jumlah kendaraan di jalan juga bertambah, dan hal ini menyebabkan peningkatan kepadatan lalu lintas karena jumlah kendaraan yang lebih banyak. Parkir merupakan pemandangan yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kendaraan seringkali terparkir di sepanjang jalan dengan beberapa orang memilih tempat parkir sesuai keinginan mereka dan mengganggu pengemudi lain dan pejalan kaki yang menggunakan jalan tersebut. Salah satu penyebab kurangnya lahan parkir di kawasan padat penduduk adalah bertambahnya jumlah kendaraan yang disebabkan oleh sifat konsumtif manusia (Rio, 2017). Tempat parkir telah disediakan oleh pemerintah di sejumlah kawasan sekitar bangunan. Akan tetapi, jumlah kendaraan tidak sesuai dengan kapasitas lahan parkir. Akibatnya, banyak kendaraan terparkir di tepi jalan yang berujung pada kemacetan lalu lintas.

Pelayanan publik merupakan suatu hal penting yang digunakan untuk menilai sejauh mana otonomi daerah berhasil dilaksanakan, salah satunya dalam hal pengaturan parkir. Keberhasilan penerapan otonomi daerah dapat diukur dari kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah (Saria et al., 2022). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Bagian I Pasal 1 Ayat 1 memberikan gambaran bahwa Pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan hukum bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, serta layanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pada saat ini, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah masih memiliki kekurangan yang menghambat pencapaian kualitas layanan yang diinginkan oleh masyarakat. Hal ini tercermin dari keluhan yang disuarakan masyarakat melalui berbagai media, yang berpotensi merusak persepsi masyarakat terhadap aparat pemerintah. Mengingat pelayanan kepada masyarakat merupakan tugas utama pemerintah, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan standar pelayanan (Rinaldi, 2012).

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur yang menjadi pintu masuk dari arah barat Jawa Timur, wilayah barat Bojonegoro atau berbatasan dengan Jawa Tengah. Seiring berjalannya waktu,

kenaikan jumlah penduduk di Kabupaten Bojonegoro berdampak pada pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi yang dimiliki oleh masyarakat. Menurut informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro, pada bulan September 2020, populasi di Kabupaten Bojonegoro mencapai 1.301.635 jiwa berdasarkan Sensus Penduduk 2020 (SP2020). Wilayahnya memiliki luas 2.307,06 km<sup>2</sup> dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 580 jiwa/km<sup>2</sup>.

### **Jumlah Kendaraan Mobil dan Motor Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 - 2021**

No	Tahun	Jumlah Mobil	Jumlah Motor
1.	2018	25,511	466,893
2.	2019	28,644	502,018
3.	2020	30,677	521,128
4.	2021	32 489	555 875

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2022

Tabel di atas menunjukkan pada tahun 2018 Kabupaten Bojonegoro tercatat 25,511 kendaraan mobil dan 466,893 kendaraan bermotor dan meningkat setiap tahun hingga berjumlah 30,677 kendaraan mobil dan 521,128 kendaraan bermotor pada tahun 2021. Dengan kepadatan penduduk serta ketidakseimbangan luas wilayah dengan jumlah kendaraan di Kabupaten Bojonegoro menyebabkan keterbatasan lahan yang digunakan untuk parkir kendaraan sehingga menimbulkan masalah kemacetan di beberapa kawasan yang ada di Kabupaten Bojoengoro.

Kepadatan lalu lintas kerap muncul di area dengan aktivitas yang padat, keterbatasan ruang, populasi yang besar dan arus kendaraan yang tinggi, seperti pasar, pabrik, kawasan pertokoan dan sebagainya. Hal ini disebabkan oleh jumlah kendaraan pribadi terus bertambah namun kapasitas jalan tidak berubah, menumpuknya barang di pinggir jalan, berjualan di area lalu lintas, serta parkir atau berhenti untuk tujuan yang tidak darurat dapat mengurangi kapasitas serta kecepatan lalu lintas di jalan. Hal ini memengaruhi lancar atau tidaknya kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya di area tersebut serta mengganggu aktivitas di sekitarnya.

Dampak sosial yang ditimbulkan, biasanya membuat kesal pengendara karena kemacetan yang dialami, bahkan bisa memengaruhi kondisi mental dari penduduk yang tinggal di sekitar (Sitanggung et al., 2018). Pada aspek ekonomi, hal ini dapat mengakibatkan hilangnya waktu pengemudi, karena tentunya akan menyita waktu pengemudi dan meningkatkan konsumsi bahan bakar. Sedangkan secara budaya dapat dilihat dari banyaknya pengendara di jalan yang tidak patuh

pada aturan, kurangnya petugas yang melakukan pengawasan, kondisi jalan yang rusak serta banyaknya kendaraan yang parkir di tepi jalan (Pramudya et al., 2016).

Kemacetan bisa disebabkan oleh adanya kendaraan yang parkir di tepi jalan. Seharusnya jalan digunakan sebagai arus kendaraan umum, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa kelancaran menjadi hak utama bagi para pengguna jalan. Hal ini sejalan dengan temuan peneliti yang mengamati titik-titik kemacetan di Kabupaten Bojonegoro, di mana salah satu faktor penyebabnya adalah parkir di tepi jalan. Serta hasil dari wawancara dengan M. Fandhy Hakim selaku Kepala Seksi Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro bahwa titik kemacetan di Kabupaten Bojonegoro biasanya sering terjadi di Jalan Teuku Umar, Jalan Panglima Sudirman, Jalan Dr. Cipto, Jalan Kh. Mansyur, dan Jalan Pemuda Timur. Jalan tersebut sering digunakan para pengendara kendaraan untuk memarkirkan kendaraannya untuk kepentingan pribadi, karena titik titik tersebut merupakan kawasan bisnis, pertokoan, dan tempat tempat ramai lainnya.

Pengelolaan tempat parkir dan keamanan kendaraan merupakan tanggung jawab penyedia layanan atau bisa disebut juga juru parkir, yang dapat berupa perorangan maupun kelompok. Penyedia layanan atau jasa tersebut terbagi menjadi dua kategori, yaitu resmi dan ilegal. Juru parkir yang resmi beroperasi di lahan yang legal. Dengan kata lain, petugas parkir yang resmi memiliki dokumentasi formal yang memberi mereka izin beroperasi ke area yang ditentukan. Berbeda dengan juru parkir ilegal yang umumnya menggunakan lokasi yang tidak diizinkan, seperti di tepi jalan atau tempat yang tidak dihuni dan tidak bisa memberikan dokumen-dokumen saat dimintai oleh pihak yang berwenang. Tempat parkir yang resmi biasanya memiliki tiket dari otoritas transportasi yang berperan sebagai identitas untuk pemilik kendaraan. Tiket dari tempat parkir yang sah juga biasanya memiliki nomor resmi, lubang-lubang kecil di tepinya, dan barcode. Di sisi lain, tempat parkir ilegal mungkin menawarkan tiket, namun dengan penarikan harga yang mahal dan kualitas kertas yang kurang bagus atau hanya hasil fotokopi. Serta juru parkir resmi memiliki atribut dari Dinas Perhubungan seperti seragam resmi serta kartu identitas yang terdapat logo dari Dinas Perhubungan yang menekankan kejelasan status resmi mereka (Agus et al., 2022).

Berdasarkan uraian diatas, sudah sepatutnya penataan parkir di Kabupaten Bojonegoro mendapatkan perhatian serius dari lembaga yang berwenang, yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro. Permasalahan parkir di Kabupaten Bojonegoro sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Bupati nomor 45 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Parkir, aturan tersebut menjelaskan bahwa jika terjadi

pelanggaran parkir, dapat diambil tindakan seperti mengempeskan ban, melepas katup udara pada roda, atau memindahkan kendaraan ke lokasi yang lebih aman menggunakan derek atau alat pengangkut lainnya.

Walaupun kebijakan tentang peraturan parkir telah ada sejak dulu, masih banyak pengguna jalan yang kurang mengetahui peraturan yang mengatur parkir di tepi jalan. Pengguna jalan menghiraukan peraturan parkir dengan parkir di lahan yang tidak diperuntukan untuk lahan parkir. Dikarenakan pengguna jalan enggan untuk berjalan kaki terlalu jauh yang menyebabkan mereka parkir di dekat tempat yang ingin dituju (blokbojonegoro.com, 2021). Kapasitas jalan berkurang akibat parkir kendaraan yang tidak teratur, terutama ketika kendaraan parkir di tepi jalan dan dapat mengganggu arus lalu lintas. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro sebagai Lembaga yang berwenang pada bidang ini perlu mempunyai strategi dalam menertibkan parkir. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Feriyanti Barasa (2019), bahwa strategi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Parkir Ilegal di Kota Pekanbaru belumlah berjalan efektif, karena Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tidak mempunyai rencana khusus untuk mengatur parkir. Mereka hanya menerapkan tindakan pencegahan yang bersifat sementara dan tidak secara menyeluruh menangani permasalahan parkir ilegal. Maka dari itu, diperlukan sebuah strategi khusus menertibkan parkir di tepi jalan. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Rusnaedi (2022), menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Watampone, melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) perparkiran, telah merancang beberapa strategi khusus untuk mengatasi masalah Juru Parkir Liar di Kota Watampone yaitu dengan melakukan pendataan/penataan, perekrutan, pembinaan dan pengawasan yang telah dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang ditetapkan oleh bagian perparkiran Dinas Perhubungan Kota Watampone untuk menjalankan aturan-aturan yang tercantum dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Watampone.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan analisis bagaimana strategi Dinas Perhubungan dalam meningkatkan pelayanan parkir di Kabupaten Bojonegoro. Menurut Alfred Chandler dalam buku karangan Siti Khotijah (2004) menyebutkan bahwa strategi merupakan rencana jangka panjang suatu perusahaan atau organisasi, meliputi pemanfaatan dan penyaluran sumber daya demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai bagian integral dari struktur pemerintahan Kabupaten Bojonegoro, Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro memegang peran krusial dalam mengatur parkir yang berperan sebagai pelaksana kebijakan lalu lintas dan pengaturan parkir di Kabupaten Bojonegoro.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman serta menganalisis strategi Dinas Perhubungan dalam meningkatkan pelayanan parkir di Kabupaten Bojonegoro dan mengetahui tindakan apa saja yang selanjutnya diperlukan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan pelayanan parkir di Kabupaten Bojonegoro. Maka dari itu, dengan adanya pemahaman tentang strategi ini nantinya akan memberikan sumbangan pemikiran dan perbaikan terkait pelayanan parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro serta sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi lembaga dalam meningkatkan pelayanan parkir di Kabupaten Bojonegoro.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yang merupakan cara untuk menggali dan memahami makna terkait dengan isu-isu sosial atau aspek kemanusiaan (Creswell, 2019). Sifat penelitian deskriptif yaitu menggunakan lingkungan alami sebagai sumber data. Fokus utama dalam penelitian kualitatif adalah pada peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam konteks sosial tertentu (Muhammad, 2011). Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2023. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, di mana dipilih orang-orang yang memiliki pemahaman yang dalam terhadap konteks permasalahan yang diteliti (Moleong, 2005). Adapun yang menjadi sumber datanya adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang berkaitan, dan data sekunder diperoleh melalui pengamatan dan dokumentasi, kemudian disusun sehingga menjadi serangkaian hasil penelitian yang tidak berupa rekayasa. Dalam hal ini, informan kunci yang dipilih yakni M. Fandhy Hakim, A.Ma.PKB.,S.Sos. selaku Kepala Seksi Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro kemudian informan pendukung yaitu juru parkir dan juga masyarakat Kabupaten Bojonegoro.

Pada penelitian ini, analisis data akan mengacu pada kerangka analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles & Huberman (1994) yang dikutip dan diterjemahkan oleh Sugiyono (2008). Proses analisis dimulai dengan pengumpulan data di lapangan, kemudian dilakukan proses reduksi data (*Data Reduction*), penyajian data (*Data Display*), dan penarikan kesimpulan serta verifikasi (*conclusion Drawing/verification*). Penelitian ini menggunakan analisis SWOT dalam merumuskan strategi peningkatan pelayanan parkir. Analisis SWOT adalah proses sistematis dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang memungkinkan suatu organisasi merumuskan strategi. Analisis ini bertujuan untuk mengoptimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunities*) yang ada, secara bersamaan juga

berupaya meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*) yang mungkin dihadapi (Rangkuti, 2008). Dalam pengumpulan data, metode yang digunakan mencakup wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisisnya melibatkan langkah-langkah seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Identifikasi Faktor Internal Dan Eksternal**

#### **Faktor Internal**

Peningkatan kualitas pelayanan publik ditentukan oleh faktor internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan pada suatu organisasi perangkat daerah. (Effendi & Mariati, 2020). Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, kita dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Secara kuantitas jumlah personel di Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro, dengan total ada 58 petugas parkir yang bertugas dalam dua shift untuk memberikan layanan parkir. Adanya peraturan yang mengatur tugas utama dan fungsi dari Dinas Perhubungan dengan jelas sebagaimana yang tertera pada Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020, melaksanakan pengelolaan tempat parkir, pengaturan tempat parkir dan pengawasan tarif parkir. Dilihat dari tugas yang harus diemban oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro, jumlah pegawai yang ada sudah memadai dan setiap tugas dapat diselesaikan dengan baik. Dua kali dalam setahun, Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro mengadakan pelatihan khusus untuk meningkatkan kualitas tenaga kerjanya. Setiap bidang di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro diberikan pelatihan fisik serta pelatihan sumber daya manusia yang meliputi kajian dan pemahaman landasan hukum Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro.

Tersedianya pendanaan dari APBD Kabupaten Bojonegoro, APBD Provinsi Jawa Timur serta APBN. Dalam rencana keuangan daerah untuk tahun 2023, tersedia informasi mengenai bagaimana dana akan dialokasikan pada tahun tersebut untuk program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp. 13.539.680.770. Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro mempunyai sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk menjalankan program-program yang bertujuan meningkatkan layanan parkir. Pemerintah menyediakan sejumlah area parkir di tepi jalan yang tersedia untuk umum guna keperluan parkir pada malam hari di luar jam sibuk. Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro dalam mengawasi dan menertibkan permasalahan parkir, dua unit mobil triton dan empat unit motor dipakai untuk menjalankan patroli di area parkir di Kabupaten Bojonegoro. Dalam melakukan

pengawasan, Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro hanya melewati beberapa titik parkir saja, dan terkadang tidak melakukan pemeriksaan di lokasi parkir. Dengan demikian, ini bisa menjadi kekuatan dan kelemahan internal bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk mengatur dan mengelola parkir liar di pinggir jalan umum.

### **Faktor Eksternal**

Faktor eksternal mengacu pada semua elemen di luar suatu organisasi yang terkait dengan kegiatan yang akan dilakukannya. Faktor eksternal juga memiliki peran penting dalam menentukan bagaimana strategi untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Hal ini mencakup peluang dan ancaman yang dihadapi oleh unit-unit pemerintah daerah.

Parkir sembarangan di pinggir jalan umum sudah menjadi pemandangan lazim bagi para pengguna jalan di area-area yang sering macet. Hal ini terjadi karena orang-orang sering memarkir kendaraan mereka tanpa memedulikan rambu yang ditempatkan di tepi jalan. Meskipun rambu larangan parkir telah dipasang di sepanjang Jalan Pemuda Timur, Jalan Panglima Sudirman, Jalan Kh. Mansyur, Jalan Teuku Umar, dan Jalan Dr. Cipto, masih terjadi peningkatan pelanggaran parkir liar. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku kurang peduli terhadap rambu dan penanda jalan serta lebih memprioritaskan kepentingan pribadi dengan tidak mau berjalan jauh dari tempat parkir dan menghindari pungutan liar juga mempengaruhi peningkatan tersebut.

Banyak pengendara memilih untuk parkir di lokasi yang kurang tepat agar bisa mengurangi pengeluaran keuangannya sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, beberapa pengendara lebih memilih untuk parkir di luar tempat yang sudah disediakan agar terhindar dari pengeluaran tarif parkir. Selain itu, petugas parkir ilegal juga menjalankan tugasnya dengan cara memungut biaya parkir dari orang-orang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Terdapat mesin parkir untuk mempermudah juru parkir menjalankan tugasnya, dengan adanya alat tersebut pengguna parkir mengambil karcis parkir hanya dengan menekan tombol saja, kemudian papan penghalang akan membuka secara otomatis dan tarif yang sudah ditentukan bisa langsung dibayarkan. Dengan adanya alat ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro bias menjadikan ini peluang untuk mengatur parkir dengan lebih baik dan mencegah adanya penyerobotan antrian parkir. Akan tetapi peluang tersebut belum bias dimaksimalkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro dikarenakan belum tersedianya parkir elektronik yang membuat kegiatan parkir lebih mudah dan cepat.



Diberlakukannya Peraturan Bupati no. 45 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Parkir dan Peraturan Daerah nomor 19 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga dapat membantu menginformasikan kepada masyarakat tentang kebijakan dan peraturan parkir yang harus dipatuhi. Hal ini bisa dijadikan peluang untuk meningkatkan keteraturan serta pengelolaan area parkir, khususnya di pinggiran jalan raya dalam upaya meningkatkan pelayanan parkir di Kabupaten Bojonegoro.

Pihak yang terlibat dalam mengatur parkir ilegal di tepi jalan adalah pemerintah dan komunitas local, yakni masyarakat. Sebagai pemangku kepentingan utama dan organisasi yang membantu dalam merumuskan kebijakan dalam menertibkan parkir liar adalah pemerintah. Entitas pemerintah yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro dan Satlantas. Di samping pemerintah, ada pihak petugas tempat parkir yang secara resmi terlibat dalam mengatur dan mengelola aktivitas parkir secara langsung. Dalam mengatur parkir, masyarakat juga turut berperan. Keterlibatan mereka berupa mengurangi parkir ilegal, mengikuti peraturan yang berlaku, serta patuh terhadap rambu lalu lintas. Namun, masih ada sebagian masyarakat yang tidak mematuhi aturan, sehingga masih banyak yang melanggar dan mengabaikan adanya parkir ilegal, pungutan liar, serta menyebabkan penyempitan jalan.

**Analisis SWOT**

Untuk menemukan isu-isu utama yang berperan dalam meningkatkan pelayanan parkir, peneliti menggunakan analisis SWOT seperti yang dijelaskan di bawah ini:

<b>INTERNAL</b>	<p><b>Kekuatan (S)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah personel Dinas Perhubungan yang sudah mencukupi</li> <li>2. Adanya program pelatihan bagi juru parkir resmi</li> <li>3. Pendanaan yang cukup untuk melaksanakan program penertiban parkir</li> </ol>	<p><b>Kelemahan (W)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurang ketatnya Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan</li> <li>2. Belum memadainya fasilitas yang diberikan</li> </ol>
<b>EKSTERNAL</b>		

	4. Tersedianya lahan parkir yang sudah disediakan	
<p><b>Peluang (O)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya mesin parkir yang dapat mempermudah juru parkir, serta mengurangi pungutan liar</li> <li>2. Diberlakukannya Peraturan Bupati Nomor no. 45 tahun 2019, dan Peraturan Daerah nomor 19 tahun 2011 yang menambah pengetahuan masyarakat mengenai kebijakan parkir</li> <li>3. Sinerrgitas dengan stakeholder cukup memadai dalam penertiban paarkir liar</li> </ol>	<p><b>S-O</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memaksimalkan mesin parkir dengan menambahnya di beberapa titik parkir (S3 O1)</li> <li>2. Membentuk area lalu lintas yang teratur dengan meningkatkan tanda peraturan dan pengelolaan lahan parkir (S3 O1)</li> </ol>	<p><b>W-O</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pengawasan di wilayah parkir yang biasanya menjadi sorotan publik guna mencegah praktik pungutan liar dan kehadiran juru parkir yang tidak resmi (W1 O1)</li> <li>2. Menerapkan aturan mengenai tata cara parkir guna mengurangi tindakan curang dari para juru parkir dengan memberikan sosialisasi dan peringatan kepada mereka yang beroperasi tanpa izin (W1 O2)</li> </ol>
<p><b>Ancaman (T)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna parkir yang menghiraukan peraturan</li> <li>2. Adanya usaha pengguna dan juru parkir untuk</li> </ol>	<p><b>S-T</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberi pengetahuan pada masyarakat mengenai betapa esensialnya mengikuti aturan dan konsekuensi yang mungkin</li> </ol>	<p><b>W-T</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membagi personil untuk melakukan pengawasan di beberapa titik parkir (W1 T1)</li> <li>2. Menyediakan parkir elektronik</li> </ol>

mencukupi kebutuhannya 3. Tidak tersedianya parkir elektronik 4. Kurangnya partisipasi pengguna parkir dalam penertiban parkir	timbul jika melanggarnya (S1 T1) 2. Membuat peluang kerja bagi para pengelola parkir ilegal untuk bergabung sebagai petugas parkir yang sah (S4 T2)	di beberapa titik parkir (W2 T3)
--	--	----------------------------------

Setelah menemukan isu-isu strategis, kita bisa mengetahui apa yang menjadi perhatian utama dalam strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro sebagai upaya meningkatkan pelayanan parkir adalah sebagai berikut:

1. Memaksimalkan mesin parkir dengan menambahnya di beberapa titik parkir (S3 O1)
2. Membentuk area lalu lintas yang teratur dengan meningkatkan tanda peraturan dan pengelolaan lahan parkir (S3 O1)
3. Meningkatkan pengawasan di wilayah parkir yang biasanya menjadi sorotan publik guna mencegah praktik pungutan liar dan kehadiran juru parkir yang tidak resmi (W1 O1)
4. Menerapkan aturan mengenai tata cara parkir guna mengurangi tindakan curang dari para juru parkir dengan memberikan sosialisasi dan peringatan kepada mereka yang beroperasi tanpa izin (W1 O2)
5. Memberi pengetahuan pada masyarakat mengenai betapa esensialnya mengikuti aturan dan konsekuensi yang mungkin timbul jika melanggarnya (S1 T1)
6. Membuat peluang kerja bagi para pengelola parkir ilegal untuk bergabung sebagai petugas parkir yang sah (S4 T2)
7. Membagi personil untuk melakukan pengawasan di beberapa titik parkir (W1 T1)
8. Menyediakan parkir elektronik di beberapa titik parkir (W2 T3)

Sesudah mengidentifikasi dan menetapkan isu-isu strategis, langkah selanjutnya adalah menilai isu-isu tersebut menggunakan Tes Litmus. Tes ini digunakan untuk mengembangkan beberapa metrik mengenai seberapa strategis suatu isu. Setiap isu diuji dengan menggunakan 13 pertanyaan dari Tes Litmus, lalu dinilai. Isu yang mendapatkan skor tinggi dianggap sebagai isu yang sangat strategis, sedangkan yang mendapatkan skor rendah dianggap sebagai isu yang bersifat operasional.

Penilaian Skor uji Tes Litmus sebagai berikut:

- 1) Total skor 13-21 = isu kurang strategis
- 2) Total skor 22-30 = isu cukup strategis
- 3) Total skor 31-39 = isu sangat strategis

Berdasarkan tes litmus yang telah dilakukan sebagai strategi dinas perhubungan dalam meningkatkan pelayanan parkir maka terdapat beberapa isu strategis dengan nilai sebagai berikut:

1. Memaksimalkan mesin parkir dengan menambahnya di beberapa titik parkir. Dikategorikan isu yang kurang strategis karena memperoleh nilai 19.
2. Membentuk area lalu lintas yang teratur dengan meningkatkan tanda peraturan dan pengelolaan lahan parkir. Dikategorikan isu yang cukup strategis karena memperoleh nilai 27.
3. Meningkatkan pengawasan di wilayah parkir yang biasanya menjadi sorotan publik guna mencegah praktik pungutan liar dan kehadiran juru parkir yang tidak resmi. Dikategorikan isu yang cukup strategis karena memperoleh nilai 24.
4. Menerapkan aturan mengenai tata cara parkir guna mengurangi tindakan curang dari para juru parkir dengan memberikan sosialisasi dan peringatan kepada mereka yang beroperasi tanpa izin. Dikategorikan isu yang sangat strategis karena memperoleh nilai 34.
5. Memberi pengetahuan pada masyarakat mengenai betapa esensialnya mengikuti aturan dan konsekuensi yang mungkin timbul jika melanggarnya. Dikategorikan isu yang sangat strategis karena memperoleh nilai 34.
6. Membuat peluang kerja bagi para pengelola parkir ilegal untuk bergabung sebagai petugas parkir yang sah. Dikategorikan isu yang sangat strategis karena memperoleh nilai 36.
7. Membagi personil untuk melakukan pengawasan di beberapa titik parkir. Dikategorikan isu yang cukup strategis karena memperoleh nilai 23.
8. Menyediakan parkir elektronik di beberapa titik parkir. Dikategorikan isu yang sangat strategis karena memperoleh nilai 37.

Dari total nilai hasil tes litmus pada isu-isu strategis tersebut, ditemukan empat isu strategis yang memiliki skor tinggi dan dianggap sangat strategis:

1. Menerapkan aturan mengenai tata cara parkir guna mengurangi tindakan curang dari para juru parkir dengan memberikan sosialisasi dan peringatan kepada mereka yang beroperasi tanpa izin.
2. Memberi pengetahuan pada masyarakat mengenai betapa esensialnya mengikuti aturan dan konsekuensi yang mungkin timbul jika melanggarnya.

3. Membuat peluang kerja bagi para pengelola parkir ilegal untuk bergabung sebagai petugas parkir yang sah.
4. Menyediakan parkir elektronik di beberapa titik parkir.

#### **Perumusan Program-Program Strategis**

Isu-isu yang memperoleh tingkat strategis yang sangat tinggi telah diidentifikasi dan kemudian diperumuskan strategi untuk mengelola isu-isu tersebut. Isu-isu strategis ini diidentifikasi melalui tes litmus yang memfokuskan pada isu-isu yang memiliki tingkat strategis yang sangat tinggi. Di bawah ini adalah strategi yang dapat dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro untuk menanggapi isu-isu strategis dalam upaya meningkatkan pelayanan parkir di Kabupaten Bojonegoro.

1. Menerapkan aturan mengenai tata cara parkir guna mengurangi tindakan curang dari para juru parkir dengan memberikan sosialisasi dan peringatan kepada mereka yang beroperasi tanpa izin, beberapa langkah dapat dijalankan seperti yang berikut ini:
  - a) Memberikan pembinaan kepada juru parkir sesuai peraturan yang berlaku.
  - b) Menindak lanjuti juru parkir dengan memberikan sanksi jika melanggar.
2. Memberi pengetahuan pada masyarakat mengenai betapa esensialnya mengikuti aturan dan konsekuensi yang mungkin timbul jika melanggarnya, beberapa langkah dapat dijalankan seperti yang berikut ini:
  - a) Memasang papan informasi maupun poster tentang peraturan parkir di sekitar titik parkir dan melalui sosial media.
  - b) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan parkir serta sanksi apa yang diperoleh jika melanggar.
- a) Membuat peluang kerja bagi para pengelola parkir ilegal untuk bergabung sebagai petugas parkir yang sah, langkah yang dapat dijalankan seperti berikut ini: Memberikan latihan bagi petugas parkir yang tidak memiliki izin untuk menjadi petugas parkir yang sah yang mematuhi peraturan.
3. Menyediakan parkir elektronik di beberapa titik parkir, beberapa langkah dapat dijalankan seperti yang berikut ini:
  - a) Memberikan pemahaman kepada masyarakat agar terhindar dari pungutan liar dengan menerapkan parkir elektronik.
  - b) Melengkapi sarana dan prasarana khususnya menyediakan parkir elektronik di beberapa titik parkir.

Berdasarkan evaluasi, prioritas utama adalah menyediakan parkir elektronik di beberapa titik-titik parkir. Isu ini dianggap krusial dalam meningkatkan kualitas pelayanan parkir di Kabupaten Bojonegoro. Dengan adanya parkir elektronik,

membuat masyarakat akan lebih mudah dan cepat dalam pembayaran dengan membayar parkir melalui dompet digital ataupun *qris*. Selain itu, dapat meminimalisir adanya pungutan liar yang dapat mengakibatkan penurunan pendapatan daerah yang berasal dari parkir.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan mengenai Strategi Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Pelayanan Parkir di Kabupaten Bojonegoro, maka dapat disimpulkan isu-isu strategis yang diperoleh dengan melakukan analisis baik dari faktor internal maupun eksternal telah diidentifikasi dan dipilah menggunakan matriks SWOT. Kemudian isu-isu strategis diuji menggunakan Tes Litmus untuk diketahui seberapa strategisnya isu tersebut. Berdasarkan hasil Tes Litmus dari isu-isu tersebut, isu yang memperoleh skor tertinggi dengan angka 37 yaitu menyediakan parkir elektronik di beberapa titik parkir, karena dengan adanya parkir elektronik maka akan memudahkan pembayaran serta mengurangi terjadinya pungutan liar. Isu tersebut harus dijadikan prioritas dan menjadi perhatian utama tanpa mengorbankan isu-isu lainnya sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Dinas Perhubungan dalam meningkatkan pelayanan parkir di Kabupaten Bojonegoro.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agus, K., Wijaya, M., Sagung, A. A., Dewi, L., Luh, D., & Suryani, P. (2022). *Perijinan dan Tindak Pidana Terhadap Juru Parkir Liar di Kota Denpasar*. 4(3), 260–265. <https://doi.org/10.22225/ah.4.3.2022.260-265>
- blokbojonegoro.com. (2021). *Dishub tertibkan parker liar di ruas jalan Bojonegoro*. Blokbojonegoro.Com. <https://blokbojonegoro.com/2021/09/15/dishub-tertibkan-parkir-liar-di-ruas-jalan-bojonegoro/>
- bps.go.id. (2020). *Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 Kabupaten Bojonegoro*. Bps.Go.Id. <https://bojonegorokab.bps.go.id/pressrelease/2021/01/25/18/hasil-sensus-penduduk-tahun-2020-kabupaten-bojonegoro.html>
- CRESWELL, J. W. (2019). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif Kuantitatif Dan Campuran* (Edisi keti). Pustaka Pelajar.
- Effendi, & Mariati. (2020). Analisis Strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Media Ekonomi (JURMEK)*, 25(1).
- Khotijah, S. (2004). *Smart Strategi Pemasaran Pasar Global*. Alfabeta.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revi). PT Remaja
- M. Wafiq Mahbubi, Cs: Strategi Dinas Perhubungan .... Page. 375

Rosdakarya.

- Muhammad. (2011). *Metode Penelitian Bahasa*. Ar-ruzz Media.
- Pramudya, W., Nyoman, I., & Arida, S. (2016). Kelurahan Ubud Di Ambang Kemacetan Total. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 4(2).
- Raharja, S., & Murdomo, J. (2021). Optimalisasi Pengelolaan Parkir Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan. *Universitas Janabadra Yogyakarta*, 101, 978–623.
- Rangkuti, F. (2008). *Analisis swot teknik membedah kasus bisnis: reorientasi konsep perencanaan strategis untuk menghadapi abad 21 / Freddy Rangkuti* (Cet. 15). Gramedia Pustaka Utama.
- Rinaldi, R. (2012). Analisis kualitas pelayanan publik (Studi pada Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara). *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 1(1), 22–34.
- Rio, L. (2017). *Efisiensi Pengelolaan Manajemen Parkir Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung*.
- Rusnaedi. (2022). Economics and Digital Business Review Strategi Dinas Perhubungan dalam Menanggulangi Parkir Liar di Tepi Jalan Umum Kota Watampone Kabupaten Bone Rusnaedi. *Economics and Digital Business Review*, 3, 263–271.
- Sitanggang, R., Saribanon, E., & Trisakti, I. (2018). *Faktor-Faktor Penyebab Kemacetan Di Dki Jakarta*. 4, 289–296.
- Sugiyono. (2008). *Metode penelitian pendidikan : pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Yunita Saria, H.M.Chotibb, Joko Susantoc, Zepa Anggrainid, J. S. (2022). Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo. *Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 9(1), 53–62. <http://ojs.stiami.ac.id>